

AL-IFFAH

Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Strategi Politik Ekonomi Islam Dalam Mengembangkan Perekonomian Pada Masa Daulah Abbasiyah Kepemimpinan Al-Mansur

Shabaha El Rojana¹, Niadatus Soliha², Anisa Putri³

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100041@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100140@student.trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100216@student.trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 18, 2024
Accepted : June 11, 2024

Revised : May 14, 2024
Available online : July 07, 2025

How to Cite: Shabaha El Rojana, Niadatus Soliha, & Anisa Putri. (2025). Islamic Political Economic Strategy in Developing the Economy During the Abbasid Dynasty under the Leadership of Al-Mansur. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(2), 104–115. <https://doi.org/10.61166/iffah.v1i2.8>

Islamic Political Economic Strategy in Developing the Economy During the Abbasid Dynasty under the Leadership of Al-Mansur

Abstract. This study aims to describe the political strategy of Islam during the Abbasid dynasty under the leadership of al-Mansur. This research method was made using a qualitative method using library studies, namely by searching for literature through journals, books and previous research. The results of this study indicate that the strategy of the Caliph al-Mansur began by eliminating various threats to his government, moving the capital of government from Anbar to Baghdad, organizing state administration by forming a vizier and several government employees, implementing economic policies, controlling and stabilizing prices of goods, regulating state revenue sources and tax collection and printing dinar and dirham money.

Keywords: Islamic economic politics, the economy of the Abbasid dynasty, Al-Mansur's leadership strategy

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi politik islam pada masa daulah abbasiyah pada kepemimpinan al-Mansur. Metode penelitian ini dibuat menggunakan metode kualitatif menggunakan studi pustaka yakni dengan pencarian literatur melalui jurnal, buku dan riset-riset sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi khalifah al-Mansur dimulai dengan menghapus berbagai ancaman terhadap pemerintahannya, memindah ibu kotapemerintahan dari anbar ke baghdad, mengatur administrasi negara dengan membentuk wazirdan beberapa pegawai pemerintahan, menerapkan kebijakan ekonomi, mengendalikan dan menstabilkan harga barang, mengatur sumber pemasukan negara dan penarikan pajak dan mencetak uang dinar dan dirham.

Kata Kunci: politik ekonomi islam, perekonomian daulah abbasiyah, strategi kepemimpinan al-Mansur

PENDAHULUAN

Politik, hukum dan ekonomi dalam konteks pembangunan ekonomi Islam pada suatu Negara memiliki keterkaitan yang erat, di mana ekonomi Islam akan kesulitan berkembang dantidak memiliki dukungan legalitas jika tidak ada political will pemerintah untuk menerapkan sistem ekonomi Islam (Syamsuri, 2022). Adapun pengertian dari politik ekonomi Islam adalahsuatu cara yang terbentuk dalam suatu kebijakan yang berfungsi sebagai pijakan dan mengaturbagaimana cara pemenuhan kebutuhan rumah tangga (ekonomi) dengan memperhatikan kaidah serta segala aturan dan prinsip ekonomi Islam.

Politik ekonomi islam atau sering disebut dengan istilah siyasah maaliyah, yaitu pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara. Politik dan ekonomi adalah entitas yang tidak bisa terpisahkan, satu sama lain saling mempengaruhi. Dinamika hubungan politik dan ekonomi telah menjadi perhatian banyak peneliti di dunia. Perubahan politik akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Sebaliknya kehidupan ekonomi berpengaruh terhadap kehidupan politik (Nur Kholis, 2013).

Konsep politik ekonomi Islam pada dasarnya adalah konsep politik yang menawarkan kebijakan yang menginginkan agar kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Semua sumber daya yang ada haruslah dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat gunatidak terjadi ketimpangan sosial yang terlalu jauh. Karena segala apa yang kita miliki di duniatermasuk harta merupakan titipan Allah Swt. Selain itu prinsip-prinsip yang ditawarkan dalam politik ekonomi Islam merupakan prinsip Islami dan mengutamakan kehalalan (Abdul Azis, 2018).

Kematangan berpolitik suatu negara selalu berhubungan erat dengan kemajuan ekonominya. Kemajuan ekonomi menopang terwujudnya situasi dan kondisi politik yang stabil, sebaliknya kondisi politik yang stabil akan menunjang terwujudnya kehidupan berekonomi yang maju dan mensejahterakan. Oleh ka-Oleh karena itu, jika situasi politik kondusif, maka perekonomian dan bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis. Perubahan suhu politik akibat dari

suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara (Nur Kholis, 2013).

Secara historis, Islam pernah berjaya di mana seluruh sendi kehidupan diterapkan berdasarkan aturan syariat Islam termasuk dalam hal aktifitas ekonomi dan politiknya dan terbukti berhasil, salah satunya pada masa daulah abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang berlangsung dari tahun 132 H/750 M hingga 657 H/1075 M. Kekuasaan Dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan Dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa Dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW yaitu al-abbas ibn-al-Muttalib ibn Hasyim. Selama dinasti ini berkuasa pola pemerintahannya berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan ekonomi. Sebelum al-abbas wafat ia mengangkat saudaranya, Abu ja'far dengan gelar al-manshur sebagai penggantinya. Oleh karena itu abu ja'far almansyur juga merupakan pendiri dinasti abbasiyah karena ia yang pertama kali membuat dan mengatur politik pemerintah dinasti abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam (Sulaiman, 2021). Pada masa inilah masa kejayaan Islam yang mengalami puncak keemasan pada masa itu berbagai kemajuan dalam segala bidang mengalami peningkatan seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik dan sistem pemerintahannya (Aminullah, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kejayaan islam dalam berbagai sektor salah satunya sektor ekonomi pada masa daulah abbasiyah, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai strategi apa yang dilakukan pada masa daulah abbasiyah terutama pada kepemimpinan Abu Ja'far al-Manshur untuk mengembangkan sektor perekonomian pada masatersebut karena masih minimnya orang yang mengkaji mengenai hal tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Politik Ekonomi Islam

Ekonomi politik Islam yang disebut dengan istilah As-Siyasah Maaliyah adalah pengembangan hukum Islam dalam program pengelolaan kekayaan negara. Baqr Ash-Shadr menyebutnya dengan istilah intrvensi negara (*Tadakhul Al-Daulah*), dimana negara dianggap penting untuk memberikan perantara dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang maju dalam masyarakat dan menjamin penggunaan skema ekonomi Islam yaitu skema ekonomi Islam yang sesuai dengan hukum Syara' dan kaidah-kaidah yang ada dalam nash (Maghfur, 2016).

Ekonomi Politik Islam cenderung masih baru bagi sebagian besar umat Islam bahkan di kalangan Ekonom Muslim saat ini . Hal ini dikarenakan semua bentuk kegiatan ekonomi Islam di atur seakan akan befokus hanya pada perkara ekonomi sektor kecil, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana syariah. Sementara masih banyak segmen ekonomi sektor besar yang harus terus menerus diperhatikan dan diaktualisasikan dalam kegiatan keuangan umat Islam (Syamsyuri, 2022).

Perekonomian

Perekonomian adalah salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia dalam mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah ilmu yang mampu mengatasi masalah kehidupan manusia dengan memanfaatkan semua sumber daya ekonomi yang ada, berdasarkan teori dan prinsip dalam sistem ekonomi yang dianggap efisien dan efektif (Megi, dkk 2020). Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan terkait alokasi sumber daya, sedangkan ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi (Iskandar, 2020). Ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (Bayu, 2016). Menurut Robbins, ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan ketersediaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut (Megi, dkk 2020). Ekonomi mikro fokus pada analisis perilaku konsumen dan produsen serta interaksi mereka di pasar. Hal ini mencakup studi tentang penawaran dan permintaan, elastisitas, teori produksi, dan struktur pasar. Di sisi lain, ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan fiskal dan moneter (Iskandar, 2020). Teori ekonomi klasik, yang dipelopori oleh Adam Smith, menekankan pentingnya pasar bebas dan peran minimal pemerintah dalam ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa pasar yang kompetitif akan menghasilkan distribusi sumber daya yang efisien. Di sisi lain, teori ekonomi Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, menekankan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan (Megi, dkk 2020). Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengangguran, dan inflasi. PDB mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu dan sering digunakan sebagai indikator utama kesehatan ekonomi. Kebijakan ekonomi mencakup kebijakan fiskal dan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian. Kebijakan fiskal melibatkan penggunaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi, sedangkan kebijakan moneter melibatkan pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga oleh bank sentral (Bayu, 2016).

Ekonomi Islam Daulah Abbasiyah

Pada masa Daulah Abbasiyah (750-1258 M), ekonomi Islam mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi salah satu pilar utama dalam kemajuan peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah, yang didirikan setelah runtuhnya Daulah Umayyah, menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan

(Suherli, 2022). Khalifah Al-Mansur, salahsatu pemimpin awal dinasti ini, memainkan peran penting dalam membangun fondasi ekonomiyang kuat melalui reformasi di sektor pertanian, perdagangan, dan industri (Ridwanto, 2023). Pertanian menjadi sektor utama dengan pembangunan sistem irigasi yang canggih dan pemanfaatan lahan subur di wilayah seperti Sawad. Pemerintah Abbasiyah juga mendorong produksi massal komoditas seperti rempah-rempah, sutra, dan keramik, yang menjadi bardagangan utama di pasar internasional. Baghdad, sebagai ibu kota, berkembang menjadi pusatperdagangan global yang menghubungkan dunia Islam dengan Eropa, Afrika, dan Asia (Dewita, 2023). Selain itu, sistem keuangan publik yang mencakup pengumpulan pajak dan zakat digunakan untuk mendanai administrasi negara, militer, dan pembangunan infrastruktur(Farah, 2022). Sistem perbankan juga mulai berkembang dengan adanya bankir yang mengelola berbagai jenis mata uang yang berlaku pada masa itu (Ridwanto, 2023). Prinsip- prinsip ekonomi Islam seperti zakat, larangan riba, dan larangan maysir diterapkan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Sulaiman, 2021).

Dengan demikian, masa Daulah Abbasiyah merupakan periode penting dalam sejarah ekonomi Islam, di mana berbagai inovasi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemajuan peradaban Islam.

Politik Ekonomi Islam Daulah Abbasiyah Pada Pemerintahan Khalifah Al-Mansur

Selama masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur (754-775 M), Daulah Abbasiyahmengadopsi berbagai strategi politik ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Strategi-strategi ini memainkan peran vital dalam memperkuat fondasi kekuasaan mereka serta memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yangbijaksana dan adil, Al-Mansur berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan politik yang mendukung pertumbuhan dan kemakmuran Daulah Abbasiyah. Berikut adalah beberapa strategi utama yang diterapkan:

1. **Pembangunan Infrastruktur:** Khalifah al-Mansur memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, dan kanal (Ikbal, 2015). Pembangunan ininitidak hanya memfasilitasi perdagangan antar wilayah, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperbaiki sistem irigasi (Meriyanti, 2018). Infrastruktur yang baik memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Sulaiman, 2021). Misalnya, pembangunan kanal-kanal irigasi membantu mengairi lahan pertanian yang luas, meningkatkan hasil panen, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk penduduk.
2. **Pusat Perdagangan:** Al-Mansur mendirikan kota Baghdad yang kemudian menjadi pusat perdagangan internasional. Kota ini menarik pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk India, Cina, dan Eropa (Ridwanto, 2023). Keberadaan Baghdad sebagai pusat perdagangan memperkuat ekonomi negara dengan meningkatkan arus barang dan jasa serta memperluas jaringan perdagangan. Baghdad menjadi

tempat bertemunya berbagai budaya dan teknologi, yang memperkaya pengetahuan dan inovasi di kalangan masyarakat Abbasiyah. Pasar-pasar di Baghdad dipenuhi dengan berbagai barang dagangan, mulai dari rempah-rempah, sutra, hingga perhiasan, yang semuanya berkontribusi pada kemakmuran ekonomi (Sulaiman, 2021).

1. Sistem Pajak: Pada masa pemerintahan Khalifah al-Mansur, pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan baitul mal. Al-Mansur memperkenalkan sistem perpajak yang efisien dan lebih adil. Pajak atas tanah dan hasil pertanian diatur sedemikian rupa untuk mendorong produksi dan mengurangi beban petani (repulika, 2017). Pajak (jizyah) dikenakan kepada setiap individu. Sistem pajak yang baik adalah sistem yang memastikan pendapatan negara yang tidak memberatkan rakyat dan stabil, sehingga terciptanya keseimbangan ekonomi (Saprida, 2021). Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Pengembangan Pertanian: Khalifah al-Mansur memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian. Ia memberikan insentif kepada petani dan memperbaiki sistem irigasi untuk meningkatkan hasil panen. Pengembangan pertanian ini tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan (Sulaiman, 2021). Al-Mansur juga mendorong penggunaan teknologi pertanian yang lebih maju, seperti alat-alat pertanian yang efisien dan teknik bercocok tanam yang inovatif, untuk meningkatkan produktivitas (Meriyanti, 2018).

3. Perdagangan Internasional: Khalifah Al-Mansur memberikan perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga menyediakan dana dan fasilitas yang diperlukan untuk penelitian dan inovasi. Dukungan ini mencakup berbagai bidang ilmu, mulai dari matematika, astronomi, kedokteran, hingga filsafat (Aminullah, 2017). Al-Mansur juga mendorong penerjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai bahasa, seperti Yunani, Persia, dan India, ke dalam bahasa Arab. Hal ini memungkinkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas dan memperkaya literatur ilmiah di dunia Islam. Dengan demikian, inovasi dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya memperkuat posisi Daulah Abbasiyah sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan (Meriyanti, 2018).

Strategi-strategi yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah tidak hanya berhasil memperkuat ekonomi mereka, tetapi juga mengangkat Baghdad menjadi salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Kebijakan-kebijakan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Baghdad menjadi magnet bagi para ilmuwan, pedagang, dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia, menjadikannya pusat intelektual dan budaya yang berpengaruh.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian

yang diteliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif. penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat alamiah dan data yang dihasilkan berupa deskriptif (Menurut Syifaul, 2020). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu menggunakan studi pustaka (library research), metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Terdapat empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber, contohnya jurnal, buku, dan riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya (Menurut Miza, 2022).

Tujuannya adalah agar dapat memberikan penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta serta kaitannya dengan fenomena yang ada. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu akan membahas lebih rinci mengenai faktor atau tantangan yang menjadi penyebab bagaimana WTO tidak dapat menyelesaikan sengketa perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China, dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai kebijakan yang telah dilakukan WTO sebelumnya.

PEMBAHASAN

Sekilas Mengenai Dinasti Abbasiyah

Dalam sejarah peradaban Islam, Daulah Abbasiyah yang muncul antara tahun 132 H/749 M hingga 656 H/1258 M, dianggap sebagai kelanjutan dari daulah sebelumnya. Nama dinasti ini diambil dari nenek moyangnya al-Abbas bin Abdul Mutalib bin Hasyim, paman Rasulullah. Dinasti Abbasiyah didirikan secara bertahap perkembangannya dengan menjatuhkan kekuasaan daulah Umayyah. Selama masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, telah terjadi perubahan signifikan di bidang politik, sosial, dan agama yang menandai evolusi pengetahuan dan keyakinan Islam menjadi pintu gerbang kemajuan dan kejayaan yang menakjubkan. Selain itu, khalifah pada dinasti Abbasiyah memakai gelar tahta, seperti al-Mansur gelar tahtanya Abu Ja'far. Yang mana gelar tahta tersebut lebih populer dari pada nama sebenarnya (Rafiq, 2022). Pada masa khalifah al-Mansur lebih mengutamakan sistem perekonomian dalam pemerintahannya. Yang mana sistem perekonomian yang diterapkan oleh al-Mansur tersebut dapat terealisasi dengan adanya unsur-unsur yang mendukung terlaksananya sistem ekonomi pada masa beliau. Adapun unsur pendukung dari terlaksananya sistem ekonomi tersebut adalah pemerintahan, pelaku ekonomi, dan sarana. Diantara wujud nyata yang diperbuat oleh khalifah al-Mansur adalah membangun pusat-pusat perdagangan, jalur perdagangan antar bangsa, armada perdagangan, sehingga pada masa beliau kota Baghdad jadi kota perdagangan. Perhatian khalifah al-Mansur terhadap bidang perdagangan ini diwujudkan pula dengan pembuatan jawatan-jawatan pos yang mengatur tentang segala macam yang berkaitan dengan penentuan harga barang di pasaran. Dengan adanya usaha-usaha

yang dilakukan oleh pemerintah dalam menata sistem perdagangan secara tidak langsung akan mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi (Sulaiman, 2021).

Strategi Politik Khalifah Al-Mansur

Menghapus Berbagai Ancaman Terhadap Pemerintahannya

Pada pertama kepemimpinan khalifah al-mansur menstabilkan pemerintahan dengan mengonsolidasikan kekuatan untuk menghancurkan musuh-musuh yang mengancam dan mengalahkan para pemberontakan. Setelah memadamkan berbagai perlawanan dan ancaman terhadap kepemimpinannya. Yang mana ancaman pertama berasal dari pamannya sendiri yang bernama Abdullah bin ali yang mana khalifah almansur melawan pamannya dengan mengirimkan abu musim al-khurasani. Sehingga Ketika pamannya mendengar bahwa al-mansur mengutus abu muslim pamannya menyiapkan senjata untuk dirinya, mengumpulkan pasukan, bekal, pakan ternak, serta barang-barang keperluan lainnya.

Setelah mendapat perintah dari khalifah al-mansur beliau berangkat bersama pasukannya meninggalkan anbar. Dan Ketika pertempuran terjadi abu muslim dengan siasat tipu dayanya, abu muslim berhasil memecah pasukan Abdullah bin ali sehingga

memenangkan pertempuran. Ia juga menjarah perkemahan Abdullah dan pasukannya. Sehingga Abdullah bin ali serta pasukannya melarikan diri ke irak.

Agar dapat mencegah abu muslim kembali khalifah al-mansur mengangkatnya menjadi gubernur di suriah dan sebagai pengganti wilayah khurasan yang dipimpin abu muslim saat itu. Untuk menyampaikan pesannya tersebut kepada Abu Muslim, Khalifah al-Mansur mengutus Yaqtin. Muslim merasa tidak terima, karena ia menganggap bahwa wilayah khurasan adalah miliknya dan bertekad untuk mendapatkannya kembali. Karena hal tersebut sehingga memicu terjadi konflik diantara keduanya. Selain itu, alasan pembunuhan terhadap Abu Muslim al-Khurasani itu juga karena Khalifah al-Mansur takut akan keagungan otoritasnya.

Setelah meninggalnya Abu Muslim al-Khurasani, muncul ancaman baru terhadap kekhalifahan Dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah al-Mansur yakni, datang dari Sunbadz pada 755 M/138 H yang berasal dari Magia. Sunbadz merupakan salah satu bawahannya Abu Muslim dan orang yang berusaha menuntut balas atas kematiannya. Guna menghadapi pemberontakan ini, Khalifah al-Mansur kemudian mengutus Jahwar bin Marrar bersama sebanyak 10.000 pasukan. Khalifah al-Mansur. Di tahun yang sama dengan pemberontakan Sunbadz dan pasukannya, kembali muncul ancaman terhadap kepemimpinan Pemberontakan kali ini cukup menyulitkan kubu Khalifah al-Mansur. Dalam penumpasan pemberontakan ini, Khalifah al-Mansur banyak mengirimkan orang-orang suruhannya dan sempat beberapa kali gagal. Namun pada akhirnya berhasil memadamkan pemberontakan tersebut.

Pemberontakan selanjutnya yang terjadi pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok *Rāwandiyyah* pada 141 H/758 M. yang merupakan kelompok sesat yang berasal dari pengikut abu muslim al-khurasani. Dalam mengatasi pemberontakan tersebut khalifah al-mansur mengutus

beberapa orang untuk membantai kelompok *Rāwandiyyah*. Pemberontakan ini berhasil diatasi oleh Ma'n bin Za'idah dan menjadikannya sebagai gubernur di wilayah yaman.

Perlawanan lain terhadap khalifah al- mansur tidak berhenti disitu. Muncul perlawanan dari golongan pengikut ali. Perlawanan ini berawal dari ketidakhadiran Muhammad bin Abdullah dan Ibrahim bin Abdullah dalam pertemuan kesetiaan Bani Hasyim kepada khalifah Dinasti Abbasiyah saat pelaksanaan ibadah haji. Ketidakhadiran keduanya dipertanyakan oleh Khalifah al-Mansur. Muhammad dan saudaranya Ibrahim juga sempat melarikan diri ke Penangkapan, pemenjaraan, dan pembunuhan terhadap lima belas orang pengikut Syiah di Irak oleh Khalifah al-Mansur membuat murka Muhammad bin Abdullah.

Pemberontakan ini kemudian dilawan oleh pasukan Khalifah al-Mansur dan berujung dengan kematian Ibrahim bin Muhammad. Muhammad bin Abdullah dieksekusi di Madinah di depan umum dengan cara digantung dan Setelah dipenggal, kepala Ibrahim tersebut dikirimkan ke hadapan Khalifah al-Mansur.

Memindah Ibu Kota Pemerintahan Dari Anbar Ke Baghdad

Ketika Khalifah al-Mansur pergi mencari tempat di hilir Sungai Tigris hingga tibalah dirinya di Mosul. Ia kemudian menemukan sebuah dusun kecil bernama Baghdad yang terletak dipinggir sebelah barat Sungai Tigris. Wilayah ini juga menjadi kawasan pertanian untuk tanaman musiman yang teduh dengan adanya pohon palem. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat perdagangan komersial. Dapat dikatakan demikian, karena wilayah ini terhubung ke Mesir dan syiria. yang dapat menjadi jalur bagi jalur perdagangan sungai melewati Mosul dan mempermudah akses menuju Teluk Persia serta wilayah lain, seperti: Cina dan Bizantium melalui jalur laut. Sehingga khalifah al-mansur kemudian memutuskan untuk membangun kota Baghdad sebagai cikal bakal ibu kota dinasti abbasiyah pada tahun 145 H/ 762 M. Daulah Abbasiyah amatlah berperan tinggi dalam perkembangan kota Bagdad baik dalam hal pemerintahan maupun perekonomian, seni dan budaya (Sri Wulan, 2023).

Mengatur Administrasi Negara Dengan Membentuk Wazir Dan Beberapa Pegawai Pemerintahan

Selain itu, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur juga mengatur administrasi pemerintahan pusat dengan melakukan kerja sama antar pejabat dan sistem lintas sektoral di antara beberapa dinas pemerintahan, seperti: dinas bidang kehakiman, keamanan, dan perpajakan. Di samping itu, Khalifah al-Mansur juga mengangkat wazir sebagai sekretaris khalifah dalam menyelesaikan permasalahan politik, penasehat kerajaan, sekaligus kepala kepegawaian negara. Seperti halnya pada masa Dinasti Umayyah terdapat sekretaris yang berada di sisi khalifah, pada masa pemerintahan Khalifah al-Mansur mengangkat wazir. Khalifah al-Mansur juga mengangkat beberapa orang lainnya yang ia angkat satu persatu, seperti: Abu Muslim al-Khurasani, Abu Salamah al-Khallal, Khalid bin Barmak, serta ar-Rabi' bin Yunus. Di antara keempat orang tersebut, hanya tiga orang yang setia, kecuali Abu Muslim al-

Khurasani. Khalid bin Barmak diangkat pertama, kemudian diikuti pengangkatan Abu Ayyub al-Muryani sebagai pengganti Khalid, dan dilanjutkan dengan pengangkatan ar-Rabi' bin Yunus menggantikan Abu Ayyub. Untuk meneruskan kekhalifahan Dinasti Abbasiyah, Khalifah al-Mansur mengangkat puteranya yang Bernamamuhammad menjadi putera mahkota. Hakim diangkat untuk mengatur urusan-urusan di

ibu kota Dinasti Abbasiyah atau Baghdad (Kota al-Mansur). Tentara direkrut untuk mempertahankan pemerintahan Khalifah al-Mansur dan memperkuat kekuatan militer padamasanya terdiri dari berbagai bangsa, seperti: Arab dan Persia. Polisi di masanya mempunyai tugas menjaga keamanan khalifah. Sedangkan, untuk gubernur, ia bertugas sebagai panglima perang, imam salat, penanggung jawab pajak, serta mengawasi keamanan wilayah dan jalan-jalan di bawah kekuasaannya (Nurlaela, 2016).

Menerapkan Sistem Ekonomi Kholifah Al-Mansur

Dalam melaksanakan kebijakan ini Khalifah Abu Ja'far alMansur sebagai pemimpin negara menyokong dan mendukung segala kegiatan perekonomian yang dilakukan rakyatnya. Bahkan, khalifah membebaskan rakyatnya untuk melakukan kegiatankegiatan ekonomi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Dari sini negara hanya menarik sebagian kecil dari pendapatan rakyat berupa penarikan pajak yang tidak memberatkan kepada mereka Pertanian pada masanya dilakukan secara adil tanpa membedakan petani yang satu dengan petani lainnya. Muslim Arab semuanya mendapat perlakuan yang sama. Khalifah al-Mansur akan bertindak tegas terhadap pejabat-pejabat yang berlaku buruk kepada petani. Guna mendukung pertanian, Khalifah al-Mansur memperluas daerah-daerah pertanian, menggali kanal, membuat bendungan, serta membuat dan menyempurnakan jalur perdagangan antar daerah baik darat maupun perairan. Bidang industri juga mendapat perhatian Khalifah al-Mansur.

Mengendalikan dan Menstabilkan Harga Barang

Khalifah al-Mansur juga mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi, yaitu mengatur laju ekonomi kerajaan pada masa itu dengan mengontrol harga barang dagang. Kebijakan ini diambil oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ketika terjadi kenaikan harga barang yangtidak semestinya akibat adanya intervensi harga. Tugas pengawalan harga barang-barang ini pada masa Khalifah al-Mansur ditugaskan kepada kepala-kepala jawaban pos.

Mengatur Sumber Pemasukan Negara dan Penarikan Pajak

Sumber pemasukan negara pada masa Khalifah al-Mansur berasal dari pajak (seperti: pajak jiwa/jizyah, pajak tanah/kharaj), harta yang diperoleh dari kaum musyrikin tanpa adanya perang (fa'i), dan harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum musyrikin (ganimah) yang kemudian dihimpun di Baitul Māl. Khalifah al-Mansur sangat berhati-hatidalam menggunakan pemasukan negara. Oleh karena itu, saat ia meninggal jumlah kas negara tersisa sebanyak 810 juta dirham.

Mencetak Uang Dinar dan Dirham

Kebijakan mencetak uang dinar merupakan kebijakan yang Khalifah al-Mansur teruskan dari khalifah sebelumnya. Dalam mencetak uang dinar, ia menggunakan model uang dinar masa Dinasti Umayyah. Ia hanya mengubah bentuk ukiran dan ukuran uang dirham tersebut. Sedangkan, untuk mata uang dirham ia mengurangi ukuran sebanyak 3 butir (Adzkiya, 2023).

Menurut penulis bila dalam suatu pemerintahan memakai system ekonomi islam seperti apa yang telah dilakukan oleh khalifah al-Mansur maka akan membawa kepada kemakmuran bagi masyarakat, karena dalam ekonomi islam mempunyai tujuan yang jelas dan rinci pula.

KESIMPULAN

Setelah meneliti dan menganalisis krisis ekonomi selama periode Khalifah al-Mansur, menggunakan referensi resmi dari berbagai sumber, maka penulis kini dapat menarik kesimpulan dengan klasifikasi berikut: Al-Mansur adalah salah satu khalifah yang dapat membawa daulah abbasiyah kepada kemajuan ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi selama era al-Mansur dapat dilihat dari struktur bangunan kota Baghdad. Sebuah kota yang sangat terkenal di seluruh dunia, kemajuan ekonomi masa al-Mansur disebabkan beberapa faktor, termasuk sistem manajemen keuangan negara tersebut. Ini cukup cepat, seiring dengan perkembangan perdagangan, minyak, industri dan lainnya. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi para cendekiawan dan intelektual Muslim agar dapat membuka jalan untuk mengembangkan sistem ekonomi yang diterapkan pada masa khalifah al-Mansur. Kemudian bisa diimplementasikan dan diaplikasikan untuk membangun jalur memperbaiki sistem ekonomi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah Najili A. (2017). DINASTI BANI ABASSIYAH, POLITIK, PERADABANDAN INTELEKTUAL. IAIAN SMH Banten.
- Abdul Azis R, "Politik Ekonomi Islam (Konsep Dalam Al-Qur'an dan Hadist Serta Implementasinya)", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2018, hal.45
- Abbas, Nurlaelah. "Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah."
- Jurnal Dakwah Tabligh* 17, no. 1 (2018): 68–83.
- Bayu Setyawan, (2016), "Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi", Academia.edu. https://www.academia.edu/28936550/Sejarah_Perkembangan_Ilmu_Ekonomi
- Dari, Sri Wulan, and Elly Roza. "ARSITEKTUR KOTA BAGDAD PADA KHALIFAH ABU JA'FAR AL - MANSHUR" 12, no. 1250 M (2023): 165–73.
- Farah, N. (2022). PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI PADA MASA BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH. *Tarikh al-Islamy*, 3(1)
- Iskandar Putong (2010), "Economics Pengantar mikro dan Makro", Jakarta, Mitra Wacana Media
- Iqbal. (2015). "Peranan Dinasti Abbasiyah Terhadap Peradaban Dunia." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*. 11(2)

- Linda Wati, "Kebijakan Politik Abu Ja'far Al-Manshur pada Dinasti Abbasiyah Tahun 754-775 M.", Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hal.3
- Lina Pusvisasari, Natasya Ramadina Azura, & Muhammad Gani Mulya P. (2025). Challenges of Indonesian Islamic Civilization in the Digital Era. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.61166/alwadhih.viii.1>
- Mauizah, Adzkiya Zayyan. "STUDI KOMPARATIF: KEBIJAKAN PUBLIK KHALIFAH ABU JA'FAR AL-MANSUR (754-775 M) DAN KHALIFAH HARUN AR-RASYID (786-809 M) PADA MASA DINASTI ABBASIYAH," 2016, 1–23.
- Magfur, I. (2016). Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MEA). *Jurnal Hukum Islam*, 14(2).
- Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, Patri c C. Wauran, (2020) "PERAN PEREMPUAN DALAM ME NINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS : PEREMPUAN PEKERJA SAWAH DI DESA LEMOH BARAT KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 20 No. 03
- Meriyati. (2018). PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH ABBASIYAH. *ISLAMIC BANKING*. 4(1)
- Muhammad Adhil Fatih Nasrullah, & Lina Pusvisasari. (2025). Muslim Thoughts in Facing Globalization in Contemporary Times. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(2), 96–104. <https://doi.org/10.61166/abqori.vii.2.10>
- Nur Kholis, "Pengaruh Politik Dalam Perkembangan Praktek Ekonomi Islam Indonesia", *Millah* Vol. XII, No. 3, 2013, hal.176
- Nur Itsnaini Yasyifa Nasyrah, Maspuroh, Nia Nuraeni, Nisa Ramadhani, & Wildan Muhamad Taqiy. (2025). Integration of Religion, Science and Islamic Epistemology. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.61166/abqori.vii.2.8>
- Najili Aminullah, "Dinasti Bani Abbasiyah Politik Peradaban Dan Intelektual", *Iaian SMHBanten*, hal.18
- Rafiq, Mohd. "STRATEGI DAKWAH PADA MASA DINASTI ABBASIYAH (Pendekatan Komunikasi Politik, Sosial Budaya, Ekonomi Dan Ilmu Pengetahuan)." *Hikmah* 16 (2022): 147–64. <https://contoh-makalah2.blogspot.com/2018/09/strategi-dakwah-pada-masa-dinasti.html>.
- Ridwanto, Siradjuddin. (2023). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA DAULAH ABBASIYAH. *Journal of Economics and Business UBS*. 12(5),
- Robiatul Samiah, Lina Pusvisasari, Agna Rahmat Maulana, & Sarah Apiani. (2025). Western Imperialism Against the Islamic World. *Al-Wadhih: Journal of Islamic History and Civilization*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/10.61166/alwadhih.viii.2>